

Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan *Good Government Governance* terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Bandung

Vicky Dzaky Cahaya Putra

Program Studi Akuntansi, Universitas Jenderal Achmad Yani, 40531, Indonesia
vicky.cahaya@lecture.unjani.ac.id

Romli

Program Studi Akuntansi, Universitas Jenderal Achmad Yani, 40531, Indonesia
romliak@lecture.unjani.ac.id

Abstract

Until now, the accountability report must be presented by the local government in accordance with the regulations regarding financial reports prepared by the local government as well as the financial accounting system owned by the local government which is effective. Because the system used can have a contribution in terms of recording and reporting regional finances, especially in terms of control for local government performance reports.

In achieving its target, the government of a region makes the financial accounting system of the local government which has quality as a guideline that regulates the process of financial activities in the government environment. Good governance is used as a desire to improve the principles of democracy and attain the rights of the people. From the concept compiled by the author, there is the importance of accountability, transparency, and internal control that can be accounted for in local government. Regarding the sample used as many as 34 employees, therefore this study aims to see how much the contribution of each variable in supporting the quality of financial reports and to examine the relationship between variables of regional financial accounting systems and good government governance on the quality of financial report information.

Keywords: *regional financial accounting system, good government governance, quality of financial report information*

Abstrak

Hingga kini laporan pertanggungjawaban wajib disajikan oleh pemerintah daerah yang sesuai dengan aturan mengenai laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah serta sistem akuntansi keuangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang efektif. Karena dari sistem yang digunakan dapat memiliki andil dari segi pencatatan dan pelaporan keuangan daerah terutama dari segi pengendalian untuk laporan kinerja pemerintah daerah.

Dalam mencapai targetnya pemerintah suatu daerah menjadikan sistem akuntansi keuangan dari pemerintah daerah tersebut yang memiliki kualitas sebagai pedoman yang mengatur dalam proses aktivitas keuangan di lingkungan pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik dijadikan sebagai keinginan untuk meningkatkan asas demokrasi dan ketercapaian hak dari rakyat. Dari konsep yang disusun oleh penulis terdapat pentingnya suatu akuntabilitas, transparansi, dan pengendalian internal yang dapat dipertanggungjawabkan pada pemerintahan daerah. Mengenai sampel yang digunakan sebanyak 34 pegawai, maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar kontribusi setiap variabel dalam menunjang kualitas laporan keuangan dan untuk menguji hubungan antara variabel sistem akuntansi keuangan daerah dan *good government governance* terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Kata Kunci: sistem akuntansi keuangan daerah, *good government governance*, kualitas informasi laporan keuangan

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam menghadapi perkembangan dunia akuntansi yang berbasis sektor publik di Indonesia dan kegiatan otonomi daerah berjalan dengan cepat, pemerintah memiliki amanah yang wajib dalam melakukan pengungkapan dari aktivitas yang telah dilakukan sebagai dasar dari pertanggungjawaban untuk pelaksanaan pemerintah pusat dan masyarakat. Disini pihak yang berkepentingan memerlukan suatu laporan keuangan yang telah dihasilkan oleh pemerintah daerah dalam merencanakan pengambilan suatu keputusan, oleh karena itu salah saji sangatlah wajib untuk diminimalisir yang berdampak menyesatkan bagi para pengguna.

Menurut Azlim et al (2012) adanya daya saing dari pemerintah daerah mewajibkan pemerintah daerah melakukan peningkatan dari segi kemandirian melalui otonomi daerah, dikarenakan tuntutan yang dihasilkan oleh daya saing semua negara yang bersumber dari globalisasi. Sistem yang dihasilkan oleh otonomi daerah berdampak terhadap keuangan yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah. Dari hal tersebut diperlukannya sistem akuntansi keuangan daerah yang efektif dan pengelolaan suatu lingkungan pemerintahan yang baik yang sistem pengelolaannya transparan, dan dapat menjadi pertanggungjawabkan. Terdapat dua segi yang dapat dijadikan acuan dasar dalam pengelolaan keuangan berbasis *Good Government Governance* yaitu diantaranya segi perkembangan teknologi dan segi ekonomi yang dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas berdasarkan tujuan awal yang telah disusun. Menurut Defitri (2016) untuk memenuhi kualitas dalam output laporan keuangan diperlukannya rancangan prosedur untuk pelaporan keuangan yang baik dengan mengikuti peraturan dari sistem akuntansi keuangan daerah dan pelaporan keuangan daerah yang optimal.

Perangkat undang-undang dalam bidang pemerintahan daerah belum dapat dijadikan sebagai acuan pemerintah dalam memberikan informasi keuangan yang dibutuhkan khususnya untuk hal pelayanan publik dan pengendalian keuangan, akan tetapi dari hal ini pemerintah masih harus mengkaji lanjutan mengenai sistem keuangan tersebut. Hal tersebut mengacu dari silsilah dasar laporan keuangan yang dapat memiliki nilai manfaat apabila mudah untuk dianalisa dan sesuai dengan kebutuhan para pengguna dan diharapkan tidak hanya untuk beberapa pihak saja tetapi semua pihak yang berkepentingan serta dapat dibandingkan dan meningkatkan ketercapaian dari kinerja keuangan yang perusahaan miliki.

Kesimpulan yang dapat diterima dari hasil pemeriksaan oleh BPK yaitu dalam bentuk opini yang berarti hasil dari pemeriksaan untuk mengidentifikasi tingkat dari kewajaran suatu informasi yang telah disajikan pada laporan keuangan. Untuk tingkat penilaian tertinggi yang berisi bahwa laporan yang disajikan memiliki unsur yang wajar serta tidak mengandung kesalahan yang material, selain itu telah memiliki wajar dinamakan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sedangkan apabila laporan yang disajikan memiliki unsur yang wajar, tidak memiliki kesalahan yang material serta telah sesuai dengan standar, tetapi memiliki kesalahan dari hal pencatatan yang masih harus dilakukan perhatian lebih dinamakan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Jika BPK telah memberikan suatu opini WDP pada daerah tertentu, maka daerah tersebut wajib mengikuti rekomendasi perbaikan yang telah diberikan oleh BPK. Menurut Silviana (2012) Laporan keuangan yang dihasilkan secara transparan yang berupa penyajian serta pengungkapan semua transaksi keuangan yang dapat menunjang dalam mendapatkan opini WTP merupakan kontribusi tata kelola keuangan negara.

Menurut pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK di Kota Bandung pada tahun 2013-2017 bahwa terjadinya opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diterima oleh Pemerintah Kota Bandung. Menurut Arman Syifa (2018) selaku Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat, mengatakan bahwa terdapat beberapa kontrak termasuk dalam pengelolaan penyewaan pertanahan yang belum terlihat jelas untuk keterbaruan dari kontrak yang dimiliki alhasil tidak rincinya dengan angka perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai piutang kegiatan penyewaan tanah tersebut, setelah ditelusuri ditemukanlah nominal sebesar Rp 400 miliar yang berupa aset tetap milik Pemerintah Kota Bandung seperti bangunan, mesin, dan gedung yang keberadaannya masih dipertanyakan, terdapat juga saldo jangka pendek yang tidak memiliki rincian datanya. Selain itu menurut Agus Slamet (2018) selaku Sekretaris Inspektorat Kota Bandung, mengatakan bahwa terdapat masalah aset tetap yang memiliki nilai tafsir sebesar Rp 2,28 triliun. Apabila dibandingkan dengan tahun 2017 maka hanya tersisa dalam angka Rp 1,12 triliun. Nominal tersebut, merupakan nilai aset sebesar Rp 694,68 miliar yang telah dilakukan penyajian, akan tetapi tidak berdasarkan nilai yang diperoleh. Sementara sisanya yang memiliki nilai Rp 430,59 miliar masih belum dapat diidentifikasi keberadaannya.

Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan *Good Government Governance* terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan pada Pemerintahan Kota Bandung

Berikut adalah tabel opini hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung tahun 2013-2017:

Tabel 1. Opini LKPD Tahun 2013-2017 berdasarkan Tingkat Pemerintah Daerah Jawa Barat

ENTITAS PEMERINTAH			2013	2014	2015	2016	2017
DAERAH							
11	176	Kab. Kawarang	1 WDP	1 WDP	1 WTP	1 WTP	1 WTP
12	177	Kab. Kuningan	1 WDP	1 WTP	1 WTP	1 WTP	1 WTP
13	178	Kab. Majalengka	1 WTP				
14	179	Kab. Pangandaran		1 WDP	1 WDP	1 WTP	1 WTP
15	180	Kab. Purwakarta	1 WDP	1 WDP	1 WTP	1 WTP	1 WTP
16	181	Kab. Subang	1 WDP	1 TMP	1 TMP	1 WDP	1 WDP
17	182	Kab. Sukabumi	1 WDP	1 WTP	1 WTP	1 WTP	1 WTP
18	183	Kab. Sumedang	1 WDP	1 WTP	1 WTP	1 WTP	1 WTP
19	184	Kab. Tasikmalaya	1 WDP	1 WTP	1 WTP	1 WTP	1 WTP
20	185	Kota Bandung	1 WDP				
21	186	Kota Banjar	1 WTP				
22	187	Kota Bekasi	1 WDP	1 WDP	1 WTP	1 WTP	1 WTP
23	188	Kota Bogor	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WTP	1 WTP
24	189	Kota Cimahi	1 WTP				
25	190	Kota Cirebon	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WTP	1 WTP

Sumber: (www.bpk.go.id) Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Tahun 2018

Dari pemberian opini tersebut menandakan bahwa masih adanya kekurangan dalam laporan keuangan yang telah disampaikan atau memiliki kesalahan pencatatan yang masih perlu untuk diperhatikan. Untuk dapat mengatasi serta meminimalisir adanya masalah tersebut maka dari inilah peneliti sangat tertarik dalam melakukan kegiatan penelitian mengenai yang menghubungkan antara 3 variabel yaitu sistem akuntansi keuangan daerah dan *Good Government Governance* terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Penelitian yang terdahulu mengenai hal yang dapat berpengaruh terhadap kualitas informasi sudah seringkali dilakukan, akan tetapi dalam hal ini kami ingin membuktikan bahwa suatu sistem akuntansi keuangan daerah dan *Good Government Governance* dapat memiliki bukti dalam bentuk pengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Karena pada hasil penelitian-penelitian sebelumnya terjadi pro-kontra penelitian, ada yang berpengaruh ada yang tidak berpengaruh. Ini berarti belum diperoleh variabel yang paling memiliki pengaruh terhadap suatu kualitas informasi laporan keuangan, maka dari itu perlu dilakukan penelitian dengan menggunakan metode *purposive sampling* agar dapat membuktikan hasilnya.

Berdasarkan suatu penelitian yang telah disusun Putri dkk (2016), Robert (2016), dan Al-Dmour (2018) menyatakan bahwa terdapatnya pengaruh dari variabel sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Hal ini tentu berbeda dengan adanya penelitian lainnya yang telah dilakukan Kartopawiro (2018), Annie dkk (2016), dan Rianisanti (2017) tidak adanya pengaruh dari sistem akuntansi keuangan daerah dengan kualitas informasi laporan keuangan.

Tullah dkk (2018), Fatima (2019), dan Haseeb (2015) telah meneliti dan berpendapat bahwa adanya suatu pengaruh yang terjadi antara *Good Government Governance* dengan kualitas informasi laporan keuangan. Tentu dari hasil penelitian tersebut sangatlah bertolak belakang dengan hasil dari penelitian yang dipaparkan oleh Ardianti (2018), Sari dkk (2016), dan Hastuti (2017) yang mengemukakan apabila *Good Government Governance* tidak ada berpengaruh dengan kualitas informasi laporan keuangan.

Dari uraian tersebut maka dapat terlihat cukup banyak kendala akuntan dalam menjaga kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkannya termasuk masalah dari lingkup Sistem Akuntansi Keuangan Daerah serta lingkup *Good Government Governance*, maka dari itu penulis bermaksud untuk meneliti yang berjudul : "Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan *Good Government Governance* Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dalam Lingkup Pemerintah Daerah di Kota Bandung".

Identifikasi Masalah

Tujuan khusus dari kegiatan penelitian yaitu untuk dapat mengetahui dan menganalisa keterkaitan variabel yang diteliti yaitu Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan *Good Government Governance* terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah di Kota Bandung.

Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini agar dapat berguna bagi semua pihak yang memiliki kepentingan baik praktisi atau akademisi, selain itu agar dapat memperbanyak pengetahuan dan memperkaya konsep atau teori mengenai suatu Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, *Good Government Governance*, dan Kualitas Informasi Laporan Keuangan yang dilakukan pada Pemerintah Daerah di Kota Bandung.. Dengan berkualitasnya laporan keuangan, maka negara dapat mengikuti perkembangan globalisasi yang menuntut daya saing yaitu dalam bidang perekonomian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Erlina (2015:6) sistem akuntansi keuangan daerah adalah implementasi dari perancangan dari kegiatan akuntansi meliputi proses merangkum kegiatan transaksi atau aktivitas dari keuangan dan pengendalian laporan keuangan demi berjalannya kemajuan dalam membuat anggaran pendapatan belanja daerah.

Berdasarkan pengertian yang telah dijabarkan diatas ini maka sistem akuntansi keuangan daerah dapat digambarkan sebagai konsep yang saling berhubungan baik dengan menggunakan metode manual/langsung maupun secara terkomputerisasi/online dalam hal pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD untuk memberikan gambaran dari informasi yang bersifat fisik dalam bentuk laporan keuangan untuk pihak-pihak yang terkait demi melakukan suatu aktivitas pengambilan keputusan di bidang ekonomi publik.

Terdapat indikator sistem akuntansi keuangan Berdasarkan Pemendagri No.59 Tahun 2007 dalam penelitian Siahaya (2018) daerah meliputi:

1. Pencatatan
 - a. Identifikasi serta mengukur gambaran dari lampiran suatu transaksi dan bukti dari kegiatan pencatatan yang telah dilakukan
 - b. Buku harian yang dicatat berdasarkan dari bukti-bukti transaksi
 - c. Kategori buku besar yang telah disusun berdasarkan jurnal.
2. Pengikhtisaran
 - a. Aktivitas yang berupa merancang neraca yang bersumber dari pencatatan *ledger* akhir dari suatu periode
 - b. Membuat konsep dari jurnal penyesuaian yaitu melakukan penyesuaian akun yang belum *up to date* berdasarkan informasi/keterangan yang terbaru
 - c. Menyusun neraca lajur adalah konsep dalam melakukan pembuatan dari suatu laporan keuangan
 - d. Membuat jurnal penutup merupakan rancangan dari gambaran prosedur yang kegiatannya melakukan posting ke akun-akun yang berhubungan yang akan merubah nominal menjadi nol
 - e. Menyusun neraca saldo yang terjadi setelah penutupan merupakan gambaran dari neraca memiliki suatu kelompok akun sebenarnya yang disusun apabila telah ditutup.
 - f. Membuat konsep dari jurnal pembalik yaitu sangat diperlukan bila telah membuat penutupan neraca saldo.
3. Pelaporan

Setelah berakhir suatu proses, maka yang perlu dilakukan adalah melakukan kegiatan pelaporan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah dan pelaporan atas penyusunan laporan keuangan.

Sistem akuntansi keuangan yang tersusun dalam lingkup lingkaran pemerintahan memiliki hubungan terhadap suatu kualitas dari laporan aktivitas keuangan yang tersaji, untuk itu menyajikan yang paling diwajibkan antara suatu tantangan dan respon dari kemajuan teknologi dalam memperlihatkan cara untuk kegiatan di masa depan. Untuk meningkatkan kesesuaian antara kemajuan suatu teknologi dengan organisasi, maka dalam diperlukannya suatu dukungan antara sistem manajemen dengan sistem akuntansi.

Kualitas yang dimiliki oleh sistem akuntansi keuangan dapat diperbaharui melalui komitmen yang dimiliki oleh manajemen serta pengetahuan dari pengguna. Penggunaan yang dilakukan sistem akuntansi keuangan dari aplikasi yang memiliki basis komputer dapat membawa suatu kemajuan seperti perubahan baru dari cara akuntansi konvensional ke dalam cara komputerisasi yang rata-rata banyak orang merasa belum siap atau maksimal untuk beradaptasi dalam penggunaannya.

Good Government Governance

Menurut Mustafa (2014:187) *Good Government Governance* merupakan kegiatan yang diadakan oleh manajemen yang memiliki tanggung jawab sesuai adanya suatu demokrasi serta lingkup kegiatan efisiensi pasar, penghindaran pengalokasian dari dana investasi, dan melakukan kegiatan yang berdasar pencegahan dari penyimpangan.

Indikator Good Government Governance

Indikator untuk *Good Government Governance* menurut dari BPKP dalam penelitian yang dilakukan oleh Sari (2012:723) yaitu berikut ini:

1. Keterlibatan Masyarakat

Masyarakat memiliki hak suara dalam melakukan pengambilan keputusan, dapat secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang sah mewakili kepentingan masyarakat. Partisipasi yang dilakukan dapat menyeluruh dan dibangun sesuai dengan kebebasan berkumpul, berpendapat, dan cakupan untuk melakukan partisipasi dengan konstruktif.

2. Kokohnya Supremasi Hukum

Rancangan yang ditegakkan memiliki sifat yang adil dan tidak memihak, termasuk hukum yang mengatur mengenai hak asasi manusia (HAM).

3. Keterbukaan

Dibangun berdasarkan dari kesesuaian informasi. Proses dari kegiatan pemerintahan lembaga-lembaga yang terkait dan adanya akses yang harus diketahui oleh pihak yang memiliki kepentingan, dan informasi harus jelas dan dapat dipahami serta dilakukan pengendalian.

4. Perhatian pada *Stakeholder*

Terdapatnya lembaga dari pihak pemerintah yang baik dan berjiwa social dalam menangani pihak yang berkepentingan.

5. Berorientasi pada Kesepakatan

Menghubungkan kepentingan yang berbeda dari kedua belah pihak untuk membangun keseluruhan konsensus yang dapat diandalkan masyarakat sekitar, terutama segi keputusan dan prosedural.

6. Keseragaman

Masyarakat berkesempatan untuk dapat meningkatkan serta mempertahankan adanya kesejahteraan.

7. Memiliki Manfaat

Dari pemerintah bersama lembaga mendapatkan hasil yang diharapkan dengan kepentingan dari masyarakat serta melakukan efisiensi sumber daya.

8. Tanggung jawab

Pemegang kebijakan di pemerintahan, pihak swasta dan ormas diharapkan bertanggung jawab kepada seluruh masyarakat dan suatu lembaga yang memegang kepentingan.

9. Rencana Strategis

Pemerintah bersama dengan masyarakat wajib untuk memiliki gambaran rancangan untuk kedepannya dalam hal peningkatan pengelolaan pemerintahan yang baik dan inisiasi dalam melakukan peningkatan wawasan dari sumber daya manusia, serta memiliki tekad dalam mewujudkannya, dan berbudaya yang memiliki jiwa sosial.

Dalam ini media yang dapat diandalkan pemerintah daerah yaitu laporan keuangan karena demi menjawab keraguan dari publik bahwa penggunaan dana publik menganut sistem transparansi dan akuntabilitas serta perlu adanya perhatian khusus terhadap kualitas laporan keuangan. Maka dari itu *good government governance* dapat menjadi suatu penentu patuh atau tidaknya pemerintah daerah dalam melakukan kegiatan pengungkapan dari laporan keuangan yang dihasilkan dan implementasinya. Selain itu apabila terlihat dari segi lain yaitu pada penerapan dari peraturan serta kesadaran dari berbagai orientasi etika profesional yang dilakukan secara signifikan berdampak positif pada kualitas laporan keuangan yang memiliki tingkatan hubungan yang langsung pada kegunaan informasi yang dimiliki oleh penanggung jawab. Namun peningkatan keterampilan akuntan tidak akan berdampak pada kualitas laporan keuangan. Hal tersebut berdasarkan dari jalannya reformasi akuntansi pemerintah yang telah ditunjuk oleh banyak berbagai negara termasuk adopsi basis akrual yang telah dilaksanakan di berbagai negara dengan cakupan lingkup yang berbeda-beda.

Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Menurut Fajri (2013:4) kualitas informasi laporan keuangan merupakan suatu hasil dari informasi berupa laporan terstruktur yang berisi atas gambaran laporan posisi keuangan yang dipertanggungjawabkan dari jalannya kegiatan transaksi.

Indikator Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Menurut Pura (2013:11) Perusahaan yang telah menghasilkan laporan keuangan harus dapat memberikan manfaat bagi pihak yang memiliki kepentingan dengan laporan keuangan yang telah disajikan yang seusai dan tidak terdapat salah saji. Maka dari itu terdapat beberapa indikator kualitas yang wajib dipenuhi, yaitu:

1. Dapat Dimengerti

Konsep penyajian laporan keuangan harus memiliki tujuan agar laporan tersebut dapat dimengerti para pembaca, yang dapat mencakup dari segi pengetahuan yang seputar lingkup ekonomi dan kegiatan bisnis.

2. Memiliki Keterkaitan

Infomasi keuangan yang dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan para pengguna dan dapat membantu dalam melakukan kegiatan evaluasi dari peristiwa masa lalu dan masa depan.

3. Kemahiran

Pengolahan informasi keuangan yang dilakukan wajib dilakukan tingkat pengujian dan tingkat kebenaran oleh bagian penilai yang netral berdasarkan dengan konsep yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. Dapat disamakan

Dalam menyajikan laporan keuangan dilakukan kegiatan perbandingan antara periode dari laporan keuangan yang dalam proses identifikasinya memiliki kecenderungan posisi serta kinerja keuangan.

5. Objektif

Laporan keuangan yang disajikan tidak memihak pada beberapa pengguna laporan keuangan saja dan harus diketahui juga oleh pihak yang memiliki keterkaitannya.

6. Tepat Sesuai Waktu

Efisiensi waktu dalam penyusunan laporan wajib dilakukan dari sebelumnya, agar penggunaannya dapat dijadikan sebagai dasar dalam melakukan kegiatan penentu mengambil keputusan.

7. Tersusun Lengkap

Menyajikan fakta yang seungguhnya serta rinci mengenai informasi keuangan dari kegiatan keuangan yang sebelumnya, sekaligus penyajian dari fakta-fakta yang tidak membuat sesat para pembaca laporan.

Kualitas dalam informasi akuntansi mengenai laporan keuangan dapat menyebabkan minimnya suatu kesalahan dalam mengambil keputusan dari pemakai laporan keuangan yang dapat memungkinkannya untuk melakukan pengambilan keputusan optimal yang mencapai tujuan yang diinginkan oleh suatu pemerintah daerah. Hal tersebut dapat tercapai apabila sebelumnya memiliki ketersediaan dari segi pengalaman sebelumnya kepada pihak-pihak yang terlibat dari kegiatan pengambilan keputusan yang memungkinkan dapat menyerap serta menggunakan informasi sebagai langkah dalam pengambilan keputusan. Untuk itu dalam mengambil suatu keputusan yang optimal tidak hanya perlu melakukan peningkatan dari segi kualitas laporan keuangan, tetapi juga membutuhkan juga suatu perhatian untuk keputusan membuat serta mengembangkan tingkat ilmiah yang bersifat praktis mereka serta memperkuat kepercayaan mereka terhadap laporan keuangan yang akan dipakai oleh para pemangku kepentingan.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan oleh kedua penulis berdasarkan dari hal tujuan penelitian yaitu adalah menggunakan metode Asosiatif, yaitu pengujian dari hubungan kedua dari variabel ataupun lebih. Apabila diidentifikasi berdasarkan eksplanasi, kegiatan yang dilakukan penelitian ini merupakan eksplanatori yang memiliki maksud dalam melakukan penjelasan tingkat kedudukan dari variabel yang diteliti dan memiliki hubungan antara hubungan kedua variabel (Sugiyono, 2015:6). Untuk melakukan pengumpulan data dari kegiatan penelitian ini maka menggunakan suatu kuesioner yang sumber datanya primer menggunakan metode survey, Dari itu perlu diambil sampel dari populasi. Populasi yang dipilih adalah pegawai dibagian keuangan di inspektorat Kota Bandung dengan sampel sebanyak 34 pegawai yang diolah menggunakan rumus Slovin, dari keseluruhan jumlah pegawai di Inspektorat Kota Bandung berjumlah 52 Pegawai. Untuk teknik pengambilan dari sampel melalui metode *non probability sampling* dengan *saturation sampling* dimana keseluruhan populasi digunakan sebagai sample. Aktivitas dalam mengumpulkan data digunakan dengan metode kuesioner dengan bersumber dari data primer dimana responden menjawab daftar pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

Untuk melakukan pengujian penelitian dengan mengungkapkan aspek-aspek atau variabel yang akan diteliti, peneliti menggunakan regresi berganda untuk mengetahui hubungan linear kedua dari variabel independen, melakukan uji asumsi klasik yang seperti (pengujian normalitas, pengujian heterokedasitas, pengujian multikolinierlitas), dilanjutkan dengan melakukan uji hipotesis yaitu uji t dan uji F yang berfungsi dalam hal pengambilan keputusan yang berdasarkan analisis data, kontrol dari observasi berdasarkan analisis data dengan menggunakan analisis pengujian korelasi dan koefisien determinasi.

Operasionalisasi Variabel

Tabel 2. Operasionalisasi Variabel

VARIABEL	KONSEP VARIABEL	INDIKATOR	SKALA UKUR
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X ₁)	Sistem akuntansi keuangan daerah adalah implementasi dari perancangan dari kegiatan akuntansi meliputi proses merangkum kegiatan transaksi atau aktivitas dari keuangan dan pengendalian laporan keuangan demi berjalannya kemajuan dalam membuat anggaran pendapatan belanja daerah (Erlina, 2015:6).	1. Pencatatan 2. Pengikhtisaran 3. Pelaporan (Pemendagri No.59 Tahun 2007 dalam Siahaya, 2018)	Ordinal

VARIABEL	KONSEP VARIABEL	INDIKATOR	SKALA UKUR
<i>Good Government Governance</i> (X ₂)	<i>Good Government Governance</i> merupakan kegiatan yang diadakan oleh manajemen yang memiliki tanggung jawab sesuai adanya suatu demokrasi serta lingkup kegiatan efisiensi pasar, penghindaran pengalokasian dari dana investasi, dan melakukan kegiatan yang berdasar pencegahan dari penyimpangan (Mustafa, 2014:187).	1. Keterlibatan Masyarakat 2. Kokohnya Supremasi Hukum 3. Keterbukaan 4. Perhatian pada <i>Stakeholder</i> 5. Berorientasi pada Kesepakatan 6. Keceragaman 7. Memiliki Manfaat 8. Tanggung Jawab 9. Rencana Strategis (Sari, 2012:723)	Ordinal
Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Y)	Kualitas informasi laporan keuangan merupakan suatu hasil dari informasi berupa laporan terstruktur yang berisi atas gambaran laporan posisi keuangan yang dipertanggungjawabkan dari jalannya kegiatan transaksi (Fajri, 2013:4).	1. Dapat Dimengerti 2. Memiliki Keterkaitan 3. Kemahiran 4. Dapat Disamakan 5. Objektif 6. Tepat Sesuai waktu 7. Tersusun Lengkap (Pura, 2013:11)	Ordinal

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengujian Asumsi Regresi

1. Pengujian Normalitas

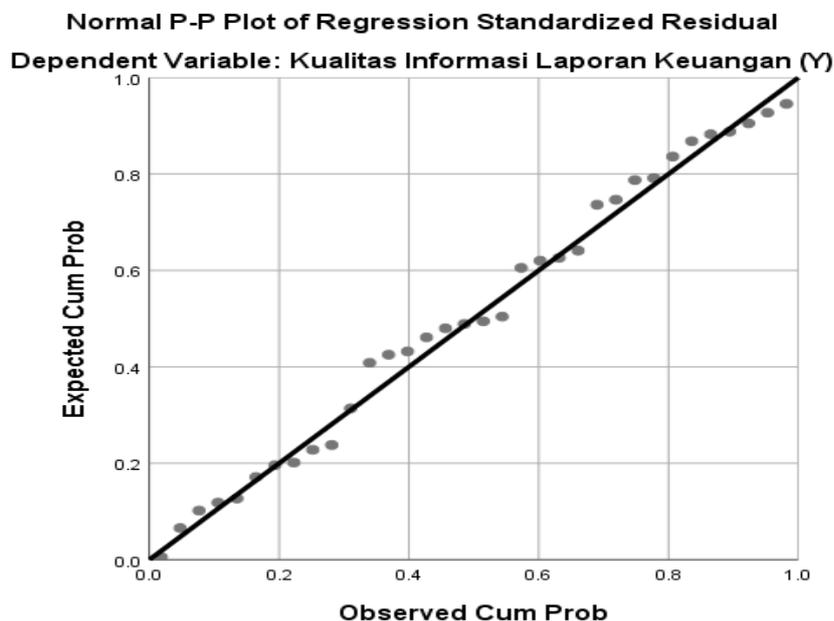
Apabila dilihat dari pengolahan uji normalitas yang bersifat residual berdasarkan kesamaan taksir yang dicapai oleh SPSS, diantaranya:

**Tabel 3. Hasil Dari Pengujian Normalitas
Kolmogorov-Smirnov Test**

		UNSTANDARDIZED RESIDUAL
N		34
Normal Parameters,b	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.94982814
Most Extreme Differences	Absolute	.082
	Positive	.063
	Negative	-.082
Test Statistic		.082
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200c,d

Sumber : Lampiran Output SPSS

Berdasarkan hasil pengujian normalitas dalam Tabel 3 maka terlihat nilai *Test Statistic* sebesar 0,082 dengan p-value (nilai sig) sebesar 0,200. Nilai tersebut tidaklah signifikan pada 0,05 (karena p-value (nilai sig) = 0,200 lebih besar dari 0,05).



Gambar 1. Grafik Uji Normalitas

Berdasarkan penjabaran dari hasil diagram tersebut maka dapat diketahui bahwa tanda titik-titik yang terdapat pada garis lurus teridentifikasi memiliki distribusi normal.

2. Pengujian Asumsi Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini :

Tabel 4. Hasil Pengujian Multikolinearitas

Coefficients^a

MODEL	COLLINEARITY STATISTICS	
	TOLERANCE	VIF
1 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1)	.431	2.323
Good Government Governance (X2)	.431	2.323

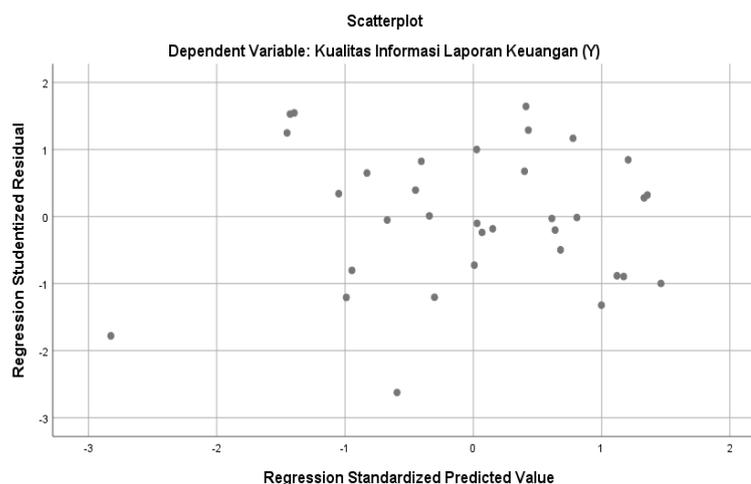
a. Dependent Variable: Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Y)

Sumber : Lampiran Output SPSS

Apabila terlihat dari perhitungan Tabel 4 tersebut maka dapat diketahui nilai dari VIF untuk variabel penelitian dengan angka 2,323 atau dibawah angka 10. Jadi disimpulkan tidak adanya masalah dari multikolinieritas untuk dari konsep regresi yang dipakai.

3. Pengujian Asumsi Heterokedastisitas

Dari perhitungan pengujian Glejtsjer dengan cara menghitung regresi variabel yang bebas terhadap keseluruhan dari nilai absolut residu (absr) diperoleh nilai yang signifikan dari uji untuk setiap variabel bebas pada kolom sig dalam tabel di atas lebih meningkat dari 0,05, yang ditunjukkan bahwa hubungan antara variabel bebas mengenai nilai kesalahan model regresi tidak signifikan. Hal ini menegaskan bahwa tidak terjadinya masalah heteroskedastisitas pada suatu model regresi.



Gambar 2. Grafik Uji Heterokedastisitas

Dari penjelasan tersebut maka dapat terlihat bahwa terdapat suatu titik yang tidak berbentuk seperti pola tertentu dan lebih untuk menyebar. Dari hal tersebut regresi memiliki asumsi tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

Analisa Regresi Linear Berganda

Dari penjabaran regresi berganda untuk penelitian ini diolah memakai *software* SPSS 25 yang dapat terlihat seperti berikut ini :

Tabel 5. Hasil Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations	
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial Part
(Constant)	8.812	4.789		1.840	.075		
1 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1)	.454	.157	.458	2.897	.007	.770	.462 .300
Good Government Governance (X2)	.362	.138	.414	2.618	.014	.759	.426 .271

a. Dependent Variable: Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Y)

Sumber : Lampiran Output SPSS

Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan *Good Government Governance* terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan pada Pemerintahan Kota Bandung

Dari perhitungan tersebut maka dapat diperoleh hasil Koefisien regresi X_1 (β_1) sebesar 0,454 dan Koefisien regresi X_2 (β_2) sebesar 0,362. Dari hasil perhitungan yang diperoleh dapat diketahui nilai koefisien regresi positif menunjukkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_1) yang semakin baik dan *Good Government Governance* (X_2) yang semakin tinggi akan berpengaruh dalam memajukan segi dari Kualitas Informasi Laporan Keuangan.

Dari koefisien regresi yang diperoleh dapat terlihat hasil dari regresi linier berganda untuk model penelitian, diantaranya:

$$Y = 8,812 + 0,454 X_1 + 0,362 X_2$$

Koefisien Determinansi (R^2)

Hasil perhitungan determinasi ditunjukkan dengan nilai R^2 dapat dijelaskan pada Tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Koefisien Determinansi Simultan X terhadap Y

<i>Model Summary</i>				
<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	.816a	.667	.645	4.07525

a. Predictors: (Constant), Good Government Governance (X2), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1)

Sumber : Lampiran Output SPSS

Perhitungan tersebut memperlihatkan bahwa nilai koefisien determinasi (R-Square) dengan angka 0,667. Hal itu memiliki arti bahwa adanya kontribusi sebesar 66,7% dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan *Good Government Governance* dalam mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan. Sedangkan 33,3% (100% - 66,7%) dikemukakan oleh variabel lainnya diluar dari penelitian ini.

Tabel 7. Koefisien Determinasi Parsial X – Y

<i>Model</i>		<i>Coefficients^a</i>			
		<i>Standardized Coefficients</i>		<i>Correlations</i>	
		<i>Beta</i>	<i>Zero-order</i>	<i>Partial</i>	<i>Part</i>
1	(Constant)				
	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1)	.458	.770	.462	.300
	Good Government Governance (X2)	.414	.759	.426	.271

a. Dependent Variable: Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Y)

Sumber : Lampiran Output SPSS

Perhitungan yang dilakukan dapat terlihat apabila Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1) memberikan kontribusi hubungan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan sebesar 35,3%. *Good Government Governance* memberikan kontribusi bagi Kualitas Informasi Laporan Keuangan sebesar 31,4%.

Pengujian Hipotesis

1. Pengujian Hipotesis Simultan (uji f)

Dari perhitungan yang dilakukan oleh kedua peneliti menggunakan aplikasi SPSS maka terlihat output dari ANOVA, diantaranya:

Tabel 8. Hasil ANOVA (Uji F)
ANOVA^a

<i>Model</i>	<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1 Regression	1029.485	2	514.742	30.994	.000b
Residual	514.838	31	16.608		
Total	1544.323	33			

a. Dependent Variable: Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Y)

b. Predictors: (Constant), *Good Government Governance* (X2), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1)

Sumber : Lampiran Output SPSS

Hasil uji menunjukkan nilai F_{hitung} (30,994) diatas dari F_{tabel} (3.035) maka dapat diperoleh hasil dari pengujian secara simultan dalam bentuk penolakan Hipotesis Null (menolak H_0). Untuk nilai signifikan dapat juga kita pahami bahwa nilai sig (0,000) itu merupakan lebih dibawah angka 0,05 yang merupakan pengujian signifikansi.

Jadi secara simultan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan *Good Government Governance* mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan.

2. Hasil Pengujian Dari Hipotesis Parsial (Uji t)

Berdasarkan dari pengujian yang telah dilakukan dapat terlihat mengenai pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dalam lingkup secara parsial.

Tabel 9. Hasil Uji t
Coefficients^a

<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>t</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>		
(Constant)	8.812	4.789	1.840	.075
1 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1)	.454	.157	2.897	.007
Good Government Governance (X2)	.362	.138	2.618	.014

a. Dependent Variable: Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Y)

Sumber : Lampiran Output SPSS

Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Pengujian dari hipotesa yang dilakukan dalam membuktikan apakah terdapat pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan. Adapun pengujian yang telah dilakukan, diantaranya:

$H_0: \beta_1 = 0$: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan.

$H_a: \beta_1 \neq 0$: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan.

Diperoleh nilai t_{hitung} untuk Sistem Akuntansi Keuangan Daerah = 2,897 dan $pvalue = 0,007$. Dari tabel t diperoleh nilai t_{tabel} dengan $db = 34-2-1 = 32$ sebesar 2,040.

**Tabel 10. Pengujian Parsial (Uji t)
pada Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

Hipotesis	t- hitung	Sig (p)	t-tabel	α	Keputusan	Keterangan
$H_0 : \beta_1 = 0$	2,897	0,007	2,040	5%	H_0 ditolak	Signifikan

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS

Untuk t_{hitung} dengan angka 2,897 yang merupakan lebih tinggi dari t_{tabel} (2,040) atau jatuh pada daerah penolakan H_0 . Apabila terlihat dari segi signifikansi 0,007 maka lebih rendah kekelieruannya yaitu sebesar 5% ($\alpha = 0,05$), dapat diputuskan untuk yang H_0 . Maka pengujian dengan tingkat kepercayaan 95% dapat diambil kesimpulan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan.

Pengaruh *Good Government Governance* terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Pengolahan uji hipotesis dapat dilakukan untuk membuktikan apakah terdapat pengaruh *Good Government Governance* mengenai Kualitas Informasi Laporan Keuangan. Maka dari hipotesis yang telah dilakukan pengujian, diantaranya:

$H_0: \beta_2 = 0$: *Good Government Governance* tidak mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan.

$H_a: \beta_2 \neq 0$: *Good Government Governance* mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan.

Diperoleh nilai t_{hitung} untuk *Good Government Governance* = 2,618 dan $p-value = 0,014$. Hasil perhitungan statistik uji pada pengujian hipotesis dirangkum pada Tabel 11.

**Tabel 11. Pengujian Parsial (Uji t)
pada Variabel *Good Government Governance***

Hipotesis	t- hitung	Sig (p)	t-tabel	α	Keputusan	Keterangan
$H_0 : \beta_2 = 0$	2,618	0,014	2,040	5%	H0 ditolak	Signifikan

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS

Untuk perhitungan nilai dari t_{hitung} dengan angka 2,618 lebih tinggi dari t_{tabel} (2,040) atau jatuh pada daerah penolakan H_0 . Apabila terlihat dari tingkat signifikan maka 0,014 lebih rendah tingkat kekeliruannya yaitu sebesar 5% ($\alpha = 0,05$), Oleh karena itu keputusan yang diambil cenderung menolak H_0 . Berdasarkan dari pengolahan dengan besaran kepercayaan 95% dapat diambil kesimpulan *Good Government Governance* dapat berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan.

V. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dapat terlihat dari hasil pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil simpulan diantaranya:

1. Secara simultan adanya pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah dan *Good Government Governance* terhadap kualitas informasi laporan keuangan
2. Secara parsial adanya pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas informasi laporan keuangan
3. Secara parsial adanya pengaruh *Good Government Governance* terhadap kualitas informasi laporan keuangan

Saran

Apabila diambil dari simpulan tersebut, maka disini kedua peneliti memberi rekomendasi dalam bentuk saran diantaranya :

1. Saran bagi akuntan pemerintah Kota Bandung
Dalam laporan keuangan pemerintahan diharapkan menyantumkan karakteristik kualitatif yang mudah untuk dipahami oleh pengguna karena lingkup dari pemahaman yang terdiri dari pengguna laporan keuangan yaitu masyarakat umum terutama pebisnis yang membutuhkan isi dari informasi yang tersaji dalam laporan keuangan untuk memudahkan dalam mengambil suatu keputusan.
2. Saran bagi peneliti lain yang meneliti judul sejenis
Untuk peneliti lain kedua penulis menyarankan untuk dapat melakukan penelitian dengan mengkombinasikan variabel independen lain yang mempengaruhi dari variabel kualitas informasi laporan keuangan dan dapat memperkuat hasil dari kesimpulan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidallah, Ahmad Adel Jamil. 2015. Impact of Using Accounting Information Systems on Quality of Financial Statements Submitted To The Income and Sales Tax Department. Al-Zaytoonah University of Jordan.
- Adhi, Daniel, Suhardjo. 2013. "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan". Jurnal STIES Semarang.
- Al-Dmour, Ahmed. 2018. Impact Of The Reliability Of The Accounting Information System Upon The Business Performance Via The Mediating Role Of The Quality Of Financial Reporting. The International Journal of Accounting and Business Society.
- Algrari, Ahmed Yass. 2018. Impact of Accounting Information Systems' Quality on Accounting Information Quality. University of Sulaimani
- Andriani, Shylvia. 2016. Effect Of Human Resource Quality, Implementation Of Regional Financial Accounting Systems And Utilization Of Information Technology On The Quality Of Financial Statements Of Work Units With Government Internal Control Systems As Intervening Variables. Finance and Accounting Journal.
- Ansella, Putri. 2015. Pengaruh Penerapan Dari Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Bandung. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.
- Ardianti, Eka Puteri. 2018. Effect of Implementation of Good Governance, Regional Financial Accounting Systems, and Utilization of Information Technology on the Quality of Local Government Financial Reports. Dewantara Journal.
- Azlim, Dervish, Usman Abu Bakar. 2012. Effect of application of Good Governance and Government Accounting Standards on Quality of Financial Reports. Accounting and Business Journals.
- Defitri, Siska Yulia. 2016. Pengaruh Pemahaman Akuntansi Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. National Conference of Applied Science, Engineering, Business and Information technology, Politeknik Negeri Padang.
- Efanita, W. V. (2013). Effect of Implementation of Good Government Governance and Government Accounting Standards on Information Quality in Financial Statements. Halu Oleo University.
- Erlina, Sakti Rambe, Rasdianto, 2015, Akuntansi Keuangan Daerah Yang Berbasis Akrua, Salemba Empat : Jakarta.
- Fajri, Nurul. 2013. Kualitas Dari Pelaporan Keuangan :Berbagai Faktor Penentu dan Konsekuensi Ekonomi. Jakarta: Salemba Empat.

- Fatima, Ali A. Alkareem Abdulla Ahmed. 2019. Effect of Corporate Governance on Financial Reporting Quality. College of Administrative & Financial Sciences AMA International University Kingdom of Bahrain.
- Halim, Abdul, Syam Kusufi. 2014. Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik. Jakarta. Salemba Empat.
- Haseeb Rahman, Saeeda Rehman, Muhammad Zahid, Alam Rachman. 2015. Corporate Governance and Quality of Financial Information Reporting: Empirical Evidence from Emerging Market. Institute of Management Sciences, University of Science and Technology Bannu Pakistan.
- Hastuti, Hilda Sri. 2017. Pengaruh Good Governance, Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Aktivitas Kualitas Laporan Keuangan Pada BPKAD Kabupaten Ogan Ilir. Jurnal Akuntansi UM Palembang.
- Kartoprawiro, Sardio, Yohanes Susanto. 2018. Analisis Terhadap Kinerja Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah. Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya.
- Kasim, Erlynda Y. 2015. Effect Of Government Accountants Competency And Implementation Of Internal Control To Quality Of Government Financial Reporting. International Journal of Business, Economics and Law.
- Kasmir. 2016. Analisa Laporan Keuangan. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Lutfiyanti, Annisa Rizky. 2018. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah di Kota Subang. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pasundan.
- Maramis, Miranda Miryam, Jenny Morasa, Heince R.N Wokas. 2018. Effect of the Implementation of Good Governance and Financial Accounting Systems on the Quality of Financial Statements in the City of Manado. Journal of Economics and Business.
- Maryam, Neneng Siti. 2016. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Kridatama.
- Mitrovic, Aleksandra. 2016. Accounting Information Systems As Support To Financial Reporting Of Companies. International Scientific Conference And E-Business Related Research.
- Mustafa, Delly. 2014. Birokrasi Pemerintah Edisi Revisi, Bandung: Alfabeta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua
- Permana, Irvan. 2012. Pengaruh Dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Implementasinya pada Akuntabilitas (Survei pada Dinas Kota Bandung). Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Komputer Bandung.
- Pura, Rahman. 2013. Pengantar Akuntansi 1. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan *Good Government Governance* terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan pada Pemerintahan Kota Bandung

- Putri, Annie Mustika, Kirmizi, Yesi Mutia Basri. 2016. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sebagai Pemediiasi. Universitas Riau.
- Ramdany. 2015. Influence The Quality of Accounting Information Systems and Effectiveness of Internal Control On Financial Reporting Quality. *Research Journal of Finance and Accounting*.
- Safkaur, Otniel, Nunuy Nur Afiah, Sugiono Poulus, Muhammad Dahlan. 2019. The Effect of Quality Financial Reporting on Good Governance. *International Journal of Economics and Financial Issues*.
- Sagara. Yusar. 2015. The Effect of Implementation Accounting Information System and Competence of Human Resources on Quality of Financial Reporting. *Research Journal of Finance and Accounting*.
- Sari, Diana. 2012. Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Bandung: SNAB Perkembangan Peran Akuntansi Dalam Bisnis Yang Profesional.
- Sari, Gusrya Indria, and Fadli. 2016. The Effect Of Application Of Good Governance, Government Accounting Standards, And Utilization Regional Accounting Information Systems For The Quality Of Regional Financial Statements. *Information System Journal*.
- Siahaya, Erwin, Meinarni Asnawi, Paulus K. Allo Layuk. 2018. The Effect Of Competence Of Human Resources, Government Internal Control Systems And Regional Financial Accounting Systems On Quality Of Financial Reports in Papua. *Journal of Regional Economic and Financial Studies*.
- Silviana. 2012. Pengaruh Komitmen Kepala Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat. *Semnas Akuntansi dan Bisnis*. ISSN:2252-3936. Universitas Widyatama.
- Subsiyani, Arik. 2015. Quality Of Financial Statements As Implementation Good Governance Government On Local Government In Indonesia. *Research Journal Finance and Accounting*.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Triwahyuni, Mustika. 2016. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kota Dumai. *Fakultas Ekonomi, Universitas Riau*.
- Tullah, Dewi Sarifah, Erma Apriyanti, Nanang Wijaya. 2018. Pengaruh Penerapan Good Government Governance dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan (Studi Kasus Pemerintah Daerah Provinsi Di Jawa Barat dan Banten). *Fakultas Ekonomi STIE Pandu Madania*.